

**ANALISIS IMPLIKASI YURIDIS TIDAK DITETAPKANYA TINDAK  
PIDANA KEJAHATAN DAN PELANGGARAN PADA UU NO. 18 TAHUN  
2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN  
HUTAN**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan  
Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**DIDIK CAHYONO**

**C100 140 330**

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS IMPLIKASI YURIDIS TIDAK DITETAPKANYA TINDAK  
PIDANA KEJAHATAN DAN PELANGGARAN PADA UU NO. 18 TAHUN  
2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN  
HUTAN**

**PUBLIKASI ILMIAH**

**Oleh:**

**DIDIK CAHYONO**

**NIM: C100 140 330**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diuji Oleh:

Dosen Pembimbing



**(Sudaryono, S.H.,M.Hum)**

## HALAMAN PENGESAHAN

### ANALISIS IMPLIKASI YURIDIS TIDAK DITETAPKANYA TINDAK PIDANA KEJAHATAN DAN PELANGGARAN PADA UU NO. 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

Oleh:

**DIDIK CAHYONO**

C100 140 330

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari: **Kamis, 04 Oktober 2018**

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

**Dewan Penguji:**

1. **Sudaryono, S.H., M.Hum.**  
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Natangsa Surbakti. S.H., M.Hum.**  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Hartanto, S.H., M.H.**  
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H.)

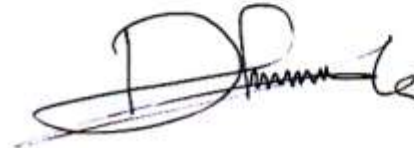
## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 04 Oktober 2018

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Didik Cahyono', with a large, stylized initial 'D'.

Didik Cahyono

C100 140 330

# **ANALISIS IMPLIKASI YURIDIS TIDAK DITETAPKANYA TINDAK PIDANA KEJAHATAN DAN PELANGGARAN PADA UU NO. 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**

## **Abstrak**

Penentuan tindak pidana dalam sebuah undang-undang pidana khusus menjadi perhatian khusus bagi penulis, ini dikarenakan dalam realitanya banyak undang-undang pidana khusus yang tidak mengatur perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan pelanggaran seperti yang terjadi dalam UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sedangkan dalam KUHP yang saat ini menjadi induk peraturan pidana di Indonesia tetap membedakan dua jenis tindak pidana tersebut sebagai ketentuan umumnya. Walaupun pada dasarnya Undang-undang pidana khusus memiliki wewenang untuk menyimpang dari aturan umum tersebut. Namun ketika sebuah undang-undang pidana khusus yang tidak mengatur ketentuan umum mengenai suatu tindak pidana maka ketentuan umum dalam KUHP dapat diberlakukan lantas bagaimana jika undang-undang pidana khusus yang tidak mengatur perbedaan dua jenis tindak pidana tersebut dapat menerapkan kembali ketentuan umum dalam KUHP tentunya hal ini akan menimbulkan implikasi yuridis baik secara materil yang berkaitan dengan KUHP dan secara formil yang berkaitan dengan KUHP.

**Kata kunci:** Tindak Pidana, Kejahatan, Pelanggaran, Implikasi Yuridis

## **Abstract**

*Determination of criminal acts in a special criminal law is of particular concern to the author, this is because in reality many special criminal laws that do not regulate the distinction between crime and violation as happened in Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, while in the Criminal Code which is currently the main criminal code in Indonesia, it still distinguishes the two types of criminal acts as general provisions. Although basically the special criminal law has the authority to deviate from these general rules. However, when a special criminal law which does not regulate general provisions concerning a crime to eat general provisions in the Criminal Code can be applied then what if the special criminal law which does not regulate the two types of crimes can reapply the general provisions in the Criminal Code, of course this will cause materially good juridical implications relating to the Criminal Code and formally relating to the Criminal Procedure Code.*

**Keywords:** Crime, Crime, Violation, Juridical Implication

## 1. PENDAHULUAN

Hutan sebagai sumber daya alam hayati memiliki arti dan nilai strategis. Nilai strategis hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat ekologi, sosial dan manfaat ekonomi merupakan tiga pilar manfaat yang dapat diperoleh dari hutan<sup>1</sup>. Nilai strategis hutan dapat pula didefinisikan dalam artian ekonomis, sebagai masukan sumber daya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial. Berarti tidak dapat dipungkiri bahwa hutan menyediakan basis sumber daya yang vital bagi perekonomian Indonesia.<sup>2</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 130, dalam penjelasan umumnya menyebutkan bahwa hutan Indonesia sebagai karunia dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis. Hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang

Produk undang-undang yang memuat unsur pidana pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus. Hal tersebut diungkapkan oleh Sudarto bahwa undang- undang pidana khusus adalah undang- undang pidana selain kitab undang- undang hukum pidana (KUHP) yang merupakan induk dari peraturan pidana di Indonesia.<sup>3</sup> Dari hal tersebut tentunya penerbitannya di Indonesia saat ini masih menggunakan prinsip-prinsip umum KUHP yang diatur dalam buku I KUHP.

Walaupun demikian, KUHP memberikan keleluasan pada produk undang-undang pidana khusus/diluar KUHP untuk menentukan hal lain atau

---

<sup>1</sup> Bambang Eko Supriyadi, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan, Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 1.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, Hal 59

menyimpang dari KUHP, dimana ketentuan buku I yang dimulai dari bab I sampai bab VIII juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan hal lain.<sup>4</sup> Sedangkan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip umum yang belum diatur oleh undang-undang pidana khusus harus mengikuti aturan umum KUHP dan KUHPA, ini dikarenakan masih menjadi *ius constituendum* atau induk dari peraturan pidana yang masih berlaku.

Dalam praktiknya KUHP sendiri membedakan bentuk perbuatan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran, dimana kejahatan diatur dalam buku II KUHP dan pelanggaran dalam buku III KUHP. Pembedaan ini merupakan salah satu prinsip penegakan tindak pidana, karena didalamnya terdapat perlakuan berbeda atau ketentuan berbeda yang mengatur antara perbuatan kejahatan dan pelanggaran, lantas bagaimana undang-undang pidana khusus diluar KUHP apakah menerapkan prinsip membedakan dua bentuk perbuatan tersebut. Dalam praktiknya Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan atau yang disingkat dengan UU P3H, tidak membedakan bentuk perbuatan tindak pidana sebagai perbuatan kejahatan dan pelanggaran tentunya dalam hal penegakan hukum menggunakan aturan dari UU P3H ini akan menemukan kendala jika suatu perbuatan yang menyangkut UU tersebut dan diduga sebagai tindak pidana, tidak digolongkan dalam suatu kejahatan atau pelanggaran. Karena dalam aturan pidana yang tidak diatur dalam UU tersebut akan berlaku prinsip umum KUHP tentunya hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan implikasi yuridis akibat tidak adanya penggolongan perbuatan tersebut.

Dapat disimpulkan beberapa rumusan permasalahan untuk kajian analisis ini sebagai berikut 1. Bagaimana realita penetapan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam UU No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan dan perusakan hutan? 2. Bagaimana implikasi yuridis akibat tidak adanya penetapan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam UU No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan dan perusakan hutan? Kemudian tujuan analisis dari peneliti sebagai berikut 1.

---

<sup>4</sup> Pasal 103 Aturan Penutup Buku I KUHP

Untuk mengetahui realita penetapan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam UU No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. 2. Untuk mengetahui implikasi yuridis yang timbul akibat tidak dibedakannya tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam UU No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

## **2. METODE**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah secara deskriptif, Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara normative, Data yang akan disajikan dalam penelitian ini hanya meliputi data sekunder saja, yaitu data dan bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan, data sekunder yang berisi bahan- bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan kemudian Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata atau kalimat.

### **2.1 Realita Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan**

Pentepan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Secara redaksi penetapan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam UU No. 18 Tahun 2013 Tentang P3H tidak tercantum dalam pasal- pasal didalamnya karena UU ini masih terkait dengan UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mengenai ketentuan penetapan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam UU Kehutanan telah dibedakan dan aturan didalamnya tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 2013 tersebut ini di tegaskan dalam pasal Pasal 113.

Dengan demikian pengaturan penetapan perbuatan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam UU No. 18 Tahun 2013 Tentang UP3H mengikuti aturan umum yang dimiliki UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang disebutkan pada pasal 78 ayat (13) yang berbunyi. Namun ketentuan dalam UU P3H menentukan hal pencabutan terhadap perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 78 UU kehutanan tersebut, hal ini disebutkan



dalam pasal 112 UU P3H, penentuan penetapan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam UU Kehutanan juga ikut terhapus dengan adanya penerbitan UU P3H tersebut, maka yang sebelumnya penentuan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran mengikuti UU Kehutanan menjadi gugur. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa UU P3H tidak membedakan tindak pidana yang termasuk dalam perbuatan kejahatan dan pelanggaran dalam penentapannya.

## **2.2 Implikasi Yuridis Akibat Tidak Adanya Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan**

### **2.2.1 Implikasi Yuridis Yang Bersifat Materil**

Implikasi yuridis materil dari penetapan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang pidana khusus mengandung artian bahwa undang-undang pidana khusus tetap terikat pada aturan umum KUHP. Aturan umum KUHP membedakan antara aturan umum untuk tindak pidana “kejahatan” dan aturan umum tindak pidana “pelanggaran”, hal ini tentunya akan memiliki implikasi yuridis dimana apabila aturan umum KUHP diberlakukan kepada UU pidana khusus diluar KUHP, UU tersebut harus menyebutkan kualifikasi yang jelas dari tindak pidana yang diaturnya, apakah merupakan “kejahatan” atau “pelanggaran” hal ini sebagai *condition sine qua non* dari ketentuan pasal 103 KUHP yang menyatakan ketentuan umum BAB I sampai dengan BAB VIII buku I KUHP berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lain diancam pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut. Sedangkan mengenai permasalahan apa saja yang mendapat implikasi yuridis yang bersifat materil dari penetapan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam sebuah undang-undang pidana khusus adalah sebagai berikut:

#### **1) Asas Nasional Aktif dan Asas Personalitas**

Apabila dicermati secara mendalam rumusan pasal 5 ayat (1) ke-2 KUHP mensyaratkan bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam pasal ini harus memiliki kualifikasi yuridis sebagai “kejahatan”. Dengan demikian, secara *a contrario* asas nasional aktif dalam pasal 5 ayat (1)

ke-2 KUHP tidak bisa diberlakukan terhadap tindak pidana yang kualifikasi yuridisnya merupakan “pelanggaran”. Sedangkan untuk asas nasional aktif sangatlah jelas bahwasanya setiap orang yang melakukan pidana diwilayah Negara Indonesia berlakulah hukum pidana padanya, hal ini perlu ditegaskan dalam UU P3H agar dibedakan secara tegas antara tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam ketentuannya agar dapat dibedakan perlakuan bagi para pelaku tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam UU tersebut. Kesimpulannya, tanpa adanya penentuan penetapan tindak pidana dalam undang- undang pidana khusus sebagai kejahatan dan pelanggaran, maka penerapan asas nasional aktif tersebut akan sulit diterapkan ketika tindak pidana dalam undang- undang pidana khusus tersebut dilakukan oleh warga Negara Indonesia di negara lain.

## 2) Percobaan Tindak Pidana

Berdasarkan pasal 53 dan 54 KUHP sangat jelas terdapat pembedaan kualifikasi yuridis tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran memiliki implikasi yuridis terkait dengan pemidanaan percobaan tindak pidana. Jelas bahwa percobaan tindak pidana yang dapat dipidana adalah kejahatan, sedangkan percobaan tindak pidana pelanggaran tidak dapat dipidana. Kesimpulannya bahwa tanpa adanya penegasan penetapan tindak pidana dalam undang-undang pidana khusus sebagai kejahatan dan pelanggaran, maka pemidanaan terhadap tindak pidana dalam undang-undang pidana khusus akan menemui kesulitan dalam hal penengakan hukum mengenai percobaan.

## 3) Pembantuan Tindak Pidana

Pertanggungjawaban pidana bagi pembuat pembantu itu terbatas atau dibatasi, yakni hanya pada wujud perbuatan apa yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya saja. Akan tetapi di lain pihak, tanggung jawab pembuat pembantu dapat diperluas tergantung pada akibat yang ditimbulkan berupa keadaan-keadaan objektif yang memberatkan yang timbul setelah diwujudkannya perbuatan (kejahatan) yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya. Sedangkan secara *a*

*contrario* untuk pembantuan dalam hal pelanggaran tidaklah dapat dipidana. Dapat disimpulkan tanpa adanya penegasan kualifikasi dalam penetapan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang pidana khusus dapat menyulitkan dalam hal menentukan pihak pembantuan dalam suatu perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana.

#### 4) Perbarengan Tindak Pidana

Dalam pasal 70 bis KUHP ditentukan secara khusus bahwa dalam menggunakan pasal 65, 66 dan 70 KUHP, kejahatan- kejahatan tersebut dalam pasal 302 ayat (1), 352, 364,373, 379, dan 482 KUHP dianggap sebagai pelanggaran, dengan pengertian jika dijatuhkan pidana-pidana penjara atas kejahatan itu, jumlahnya paling banyak adalah delapan bulan. Dari rumusan pasal-pasal tersebut diketahui bahwa perlakuan hukum terhadap tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam hal perbarengan sangatlah berbeda mengenai penjatuhan pidana kurungan maupun kurungan pengganti. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa penentuan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam perundang-undangan pidana khusus sangatlah penting dalam hal untuk menentukan pemidanaan perbarengan perbuatan (*concursum realis*).

#### 5) Daluwarsa Penuntutan

Pasal 78 ayat (1) KUHP nampak bahwa pembedaan kualifikasi yuridis tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran memiliki implikasi yuridis terkait dengan perhitungan tenggang waktu daluwarsa penuntutan, tenggang waktu penuntutan pelanggaran lebih pendek dibandingkan dengan tenggang waktu penuntutan kejahatan demikian juga dengan tuntutan pidana yang ringan lebih pendek waktu penuntutannya dibandingkan dengan tindak pidana yanguntutannya lebih berat. Maka dari itu menjadi sangatlah penting penentuan kualifikasi tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam sebuah perundang-undangan pidana khusus agar dapat diketahui batas waktu penuntutan perbuatan tindak pidana tersebut.

### 2.2.2 Implikasi Yuridis Formal

Implikasi yuridis formal dari penentuan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang pidana khusus, mengandung arti bahwa undang-undang pidana khusus diluar KUHP terikat pada aturan umum yang terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Barda Nawawi Arief, penetapan kualifikasi yuridis tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran ini memiliki implikasi yuridis formal dengan masalah penangkapan dan penahanan.<sup>5</sup>

#### 1) Penangkapan

Penangkapan mempunyai definisi berdasarkan pasal 1 angka 20 KUHAP sebagai tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yaitu bukti yang menyatakan adanya perbuatan tindak pidana<sup>6</sup>. Pasal 19 ayat (2) KUHAP menyatakan “terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Dari pasal 19 KUHAP inilah terlihat bahwa penangkapan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan dapat dilakukan sedangkan untuk pelaku perbuatan pelanggaran hanyalah sebagai “pengecualian” tentunya hal ini menjadi implikasi yuridis apabila suatu perundang-undangan pidana khusus tidak mengatur adanya perbuatan kejahatan dan pelanggaran.

#### 2) Penahanan

Penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Hal. 363-364

<sup>6</sup> Pasal 17 KUHAP dan Penjelasannya

undang ini.<sup>7</sup> Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa substansi dari pengertian penahanan ialah menempatkan seseorang di tempat tertentu.

Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa penahanan terutama dapat dilakukan terhadap perbuatan kejahatan karena menurut system yang dianut saat ini perbuatan yang diancam oleh pidana penjara merupakan perbuatan kejahatan. Namun demikian menurut pasal 21 ayat (4) point b menyebutkan adanya juga penahanan terhadap pelanggaran,

### **2.3 Keterkaitan Implikasi Yuridis Tidak Ditetapkannya Tindak Pidana Kejahatan Dan Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ( R-KUHP )**

#### **2.3.1 Perbedaan Prinsip Umum Penentuan Tindak Pidana Kejahatan Dan Pelanggaran Antara KUHP Dengan R-KUHP**

Saat ini KUHP merupakan induk peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia atau sebagai *ius constitutum* atau peraturan hukum yang berlaku saat ini, sedangkan saat ini pembentuk UU Negara Indonesia telah membuat panitia kerja pembentukan R-KUHP yang saat ini bisa dikatakan sebagai *ius constituendum* atau hukum yang nantinya dimasa depan diberlakukan. Namun permasalahan dalam hal ini terkait implikasi yuridis yang penulis teliti bahwa R-KUHP dalam ketentuan umum tidaklah lagi membedakan tindak pidana sebagai kejahatan (*misdrijven*) dan tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*), melainkan keduanya dipakai dalam satu istilah dan disebut sebagai “tindak pidana” saja.

---

<sup>7</sup> Pasal 1 butir 21 KUHP

### 2.3.2 Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus Diluar R-KUHP

R-KUHP sebagai *ius constituendum* induk peraturan hukum pidana yang akan berlaku dimasa mendatang telah dipersiapkan oleh para pembentuk UU untuk menggantikan KUHP, melihat implikasi yuridis yang timbul akibat tidak ditetapkannya tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam peraturan pidana khusus terhadap KUHP yang berada di Indonesia saat ini, dalam R-KUHP tahun terbitan 2017 ini terdapat aturan peralihan yang mengatur peraturan atau perundang-undangan pidana khusus diluar KUHP untuk menyesuaikan dengan ketentuan R-KUHP tersebut diantaranya pada pasal 775 dan 776 R-KUHP Tahun 2017.

## 4. PENUTUP

Kesimpulan dari Skripsi ini adalah *Pertama*, terhadap penetapan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), bahwasanya UU tersebut masih terkait dengan UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dimana hal-hal yang tidak bertentangan dalam UU Kehutanan terhadap UU P3H masih dinyatakan berlaku hal ini diatur dalam pasal 113 UU P3H. dalam pembedaan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran UU kehutanan telah membedakan jenis perbuatan pidana menjadi tindak pidana kejahatan dan pelanggaran sedangkan dalam UU P3H belum dibedakan secara tegas. *Kedua*, mengenai implikasi yuridis akibat tidak ditetapkannya tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam UU P3H menimbulkan implikasi yuridis yang bersifat materil dan formil. Implikasi yuridis materil akibat tidak ditetapkannya tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam UU P3H terkait dengan KUHP meliputi: (1) Asas Nasional Aktif dan Asas Personalitas (2) Percobaan Tindak Pidana (3) Pembantuan Tindak Pidana (4) Perbarengan Tindak Pidana (4)

Daluwarsa Penuntutan. Sedangkan implikasi yuridis yang bersifat formil akibat tidak ditetapkannya tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam UU P3H yang terkait dengan KUHAP yaitu: (1) Penangkapan (2) Penahanan.

Dalam penelitian ini penulis memberikan saran yaitu *Pertama*, Terhadap pembuat Undang- Undang yaitu Pemerintah Republic Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republic Indonesia sebagai pembentuk UU dan penanggung jawab terlaksanya UU, banyak UU pidana khusus yang tidak mengatur perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan pelanggaran tentunya hal tersebut akan mengakibatkan implikasi yuridis yang mungkin sama dengan hasil penelitian ini. Hukum haruslah pasti karena Indonesia merupakan negara hukum jalanya suatu Negara diatur oleh hukum jika hukum yang dibuat telah mengandung cacat dan bertentangan dengan hukum lainya maka haruslah diadakan perubahan atau revisi dari peraturan tersebut tentunya dalam hal ini para pembentuk UU khususnya pemerintah harus mengadakan pemeriksaan terhadap seluruh UU pidana khusus agar tidak memiliki implikasi yuridis. Untuk pembentuk UU yang sedang merancang KUHP yang baru tentunya harus sangat teliti dan meninjau kembali peraturan- peraturan pidana terdahulu karena RUU KUHP juga tidak membedakan antara tindak pidana kejahatan dan pelanggaran.

## **PERSANTUNAN**

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya tulis ini kepada para pihak yang sangat berkontribusi dalam penyelesaian karya tulis ini, *pertama* Untuk orang tua saya tercinta terimakasih atas doa-doa dan semangat yang diberikan. *Kedua* untuk saudara saya adik saya khususnya yang selalu menjadi semangat untuk berjuang menyelesaikan pendidikan ini, *ketiga* untuk teman- teman ku yang saya banggakan terimakasih atas kebersamaan dalam berjuang menuntut ilmu, Dan untuk bapak Sudaryono S.H., M.Hum selaku pembimbing skripsi ini terimakasih atas bimbinganya. Penulis berharap semoga kedepanya karya tulis ini dapat berguna sebagaimana semestinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arief, Barda Nawawi ,2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana.

Hamzah, Andi, 2011, *KUHP&KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta.

Supriyadi, Bambang Eko, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan, Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.